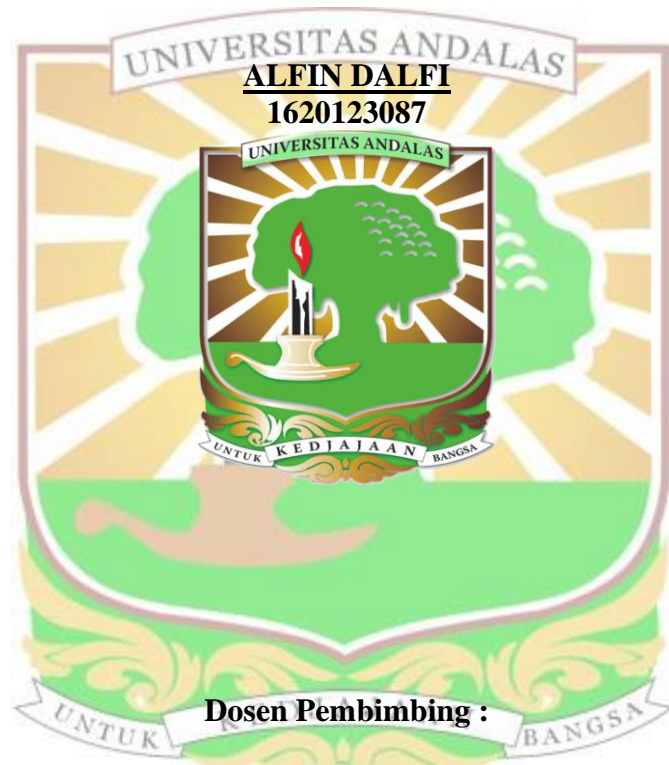


**PRAKTIK PEMBERIAN SALINAN AKTA OLEH NOTARIS
YANG MINUTA AKTANYA BELUM DITANDA TANGANI
SECARA LENGKAP**

OLEH :



- Dosen Pembimbing :**
- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H**
 - 2. Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

PRAKTIK PEMBERIAN SALINAN AKTA OLEH NOTARIS YANG MINUTA AKTANYA BELUM DITANDA TANGANI SECARA LENGKAP

Alfin Dalfi, NIM. 1620123087, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana
Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2019, 86 halaman

ABSTRAK

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Semua hal tentang notaris harus mengacu pada Undang-undang tersebut, baik menyangkut kewenangan, kewajiban dan larangan dalam menjalankan jabatan notaris tersebut. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan bahwa seorang notaris haruslah menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak memihak. Seorang notaris juga harus taat dan lebih teliti terhadap semua peraturan-peraturan dan nilai moral bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau akan diadakan. Hal ini berarti bahwa seorang notaris harus tetap memperhatikan seluruh Peraturan Perundang-undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar dapat menyesuaikan dengan akta yang dibuatnya tersebut, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dimana hal tersebut dapat mengakibatkan aktanya menjadi kehilangan otensitasnya atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini menarik dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan permasalahan penelitiannya : mengapa di dalam praktik terjadi pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap dan bagaimana akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian diperoleh dalam praktik masih saja terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tidak dilengkapinya tanda tangan dalam Minuta Akta Notaris pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Minuta Akta Notaris. Dalam pemeriksaan rutin Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang di tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 70 huruf b UUN terjadi 5 (lima) temuan pelanggaran dalam pemeriksaan rutin terhadap protokol Notaris tersebut dimana terdapat pelanggaran berupa tidak lengkapnya tanda tangan minuta akta Notaris. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kata Kunci : minuta akta, salinan akta, dan pemeriksaan.

PRACTICE OF PRIVATE COPY OF A DEED TO A NOTARY THAT IS ASKED AS THE ACTION HAS NOT BEEN MARKED COMPLETE

Alfin Dalfi, 1620123087, Master of Notary Program, Law Major on Andalas University,
2019, 86 pages

ABSTRACT

Position of Notary is regulated in Act Number 2 of 2014 concerning Amendment to Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position. All matters regarding a notary must refer to the Law, both regarding the authority, obligations and prohibitions in carrying out the position of the notary public. In the oath of office, the notary states that a notary must carry out his position honestly, thoroughly and impartially. A notary public must also be obedient and more careful about all the regulations and moral values for the notary office that are in force or will be held. This means that a notary public must still pay attention to all existing laws and regulations that are still applies in Indonesia in order to be able to adjust to the deed he made, so as to avoid mistakes that might occur because they conflict with existing laws and regulations where this may result in the deed being losing its authenticity or being degraded to a deed under the hand. This is interesting to do research in the form of a scientific work in the form of a thesis with the research problem: why in practice there is a copy of the deed by a notary whose minutes have not been signed completely and how the legal consequences of granting a copy of the deed by a notary minutes whose deeds have not been signed completely. The problem approach used is normative juridical with data sources used from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. From the research results obtained in practice there are still violations found by the Notary Supervisory Board with incomplete signatures in the Notary Deed Minutes during the examination of the Notary Deed Minutes. In the routine inspection of the Padang Notary Regional Supervisory Council in 2019, according to his authority in Article 70 letter b UUN 5 (five) findings of violations were found in the routine inspection of the Notary protocol where there was a violation in the form of incomplete signature of the notary deed. Notary Deed has perfect proof of strength in a civil lawsuit, but if it violates certain provisions, the proof of its value will be degraded to the strength of proof as a deed under the hand.

Keywords: minuta deed, copy of deed, and examination.